

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada PT. Wahana Otto
Multiartha Tbk Cabang Bekasi)**

PRAPTININGSIH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan perlindungan terhadap hak kreditur dengan jaminan benda bergerak. Teori yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian dari fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan melakukan pelaksanaan title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Penulis menyarankan terhadap objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit hendaknya dilakukan dengan sesempurna mungkin dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan Para pihak baik itu debitur dan kreditur hendaknya memahami dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengenai hak dan kewajibannya masing-masing dan dalam penyelesaian sengketa hendaknya para pihak yakni kreditur dan debitur memilih peradilan arbitrase. Hal ini guna memberikan peradilan yang cepat serta biaya yang lebih murah

Kata Kunci: k r e d i t u r , Fiducia, Eksekusi jaminan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG

(Studi Kasus pada PT. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi)

PRAPTININGSIH

ABSTRACT

Execution fiduciary is a foreclosure and sale of objects that become the object of fiduciary. In case the debtor defaults, the creditor can make the execution of fiduciary to perform implementation executorial title listed in the certificate fiduciary. Executorial title is the same as a court decision that has acquired the force of law remains. Giver fiduciary (debtor) if default shall submit objects into objects fiduciary in order execution fiduciary (Article 30). Sales of fiduciary object on a stock exchange or similar object if the fiduciary form of securities or shares. The object fiduciary who is not registered, the execution is done by filing a civil lawsuit to court. Theoretically and empirically that the fiduciary has significance in terms of people's desire to accommodate the credit needs. Especially to users of fiduciary small and medium enterprises such as shops, retailers, artisans, restaurants, agriculture is very helpful and not burdensome, therefore, its presence can provide multiple benefits. Credit receiving party still can master the collateral for the purposes of his everyday business and the banks more practical use due Leasing fiduciary binding procedure does not need to provide a special place to store items such as the institutions pledge collateral. In the mortgage agreement, the collateral must be submitted to the bank in accordance with Article 1150 Junto Article 1152 paragraph (2) of the Civil Law Act Expected change objects fiduciary in the credit agreement should be done as perfectly as possible to follow the rule of law. In the parties' dispute resolution that creditors and debtors choose a court of arbitration. This is to provide swift justice and cheaper cost. The arbitral tribunal may be used in the settlement of disputes in accordance with the Arbitration Act No. 30 of 1999.

Keywords: Creditors, Fiducia, Execution guarantee